



MEMPERTAHANKAN MOMENTUM PERTUMBUHAN MELALUI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DALAM APBN



MINISTRY OF FINANCE

DIRECTORATE GENERAL OF BUDGET FINANCING AND RISK MANAGEMENT

djppr

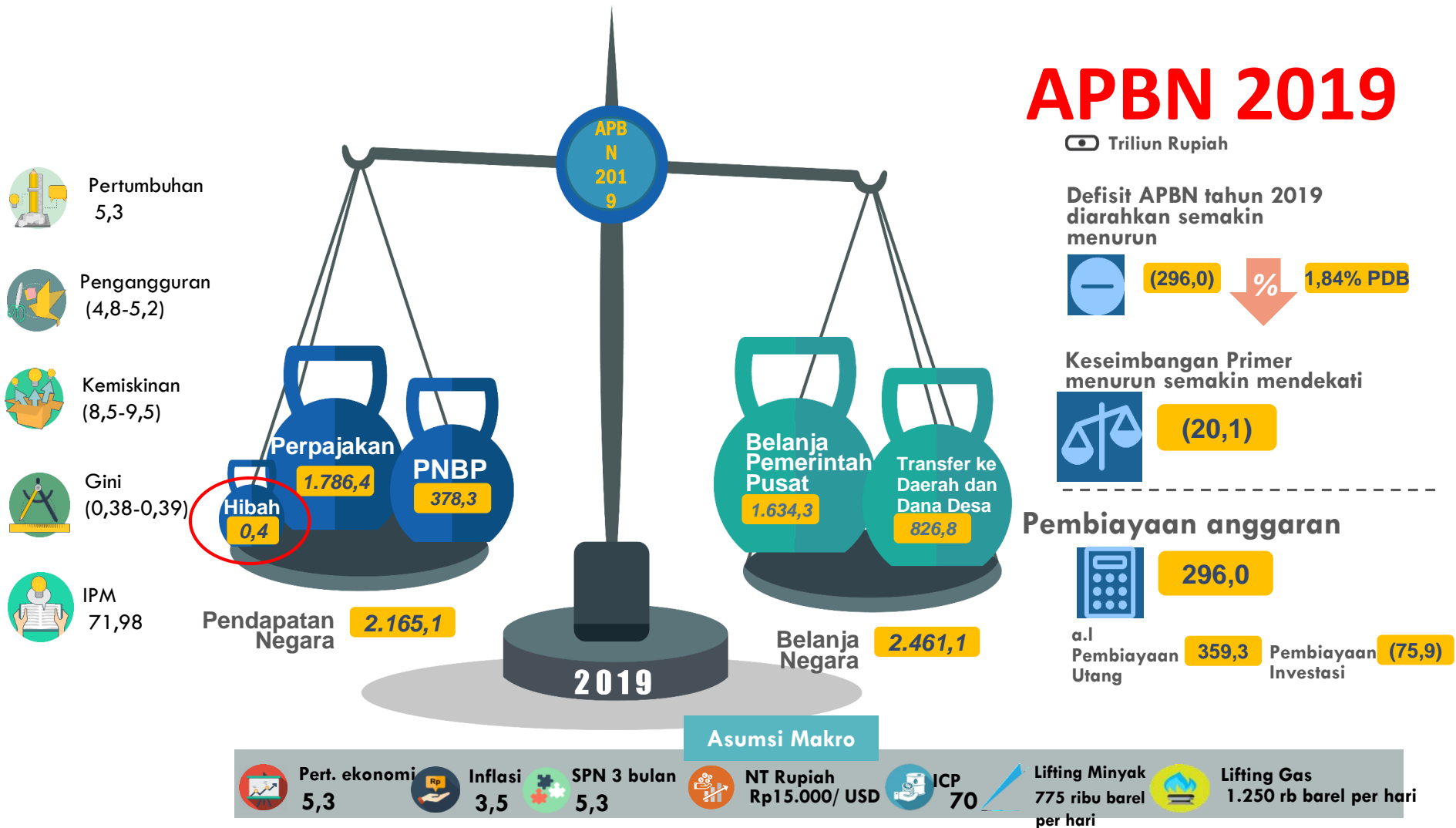


KEBIJAKAN FISKAL

DAN APBN 2019

APBN 2019

Lebih Sehat, Adil, dan Mandiri



SINERGI KEBIJAKAN SEKTOR RIIL, FISKAL, DAN MONETER

Menjaga stabilitas dan meningkatkan daya saing untuk pembangunan berkelanjutan



Hukum dan
Keamanan



Global/
Eksternal



Politik

Dukungan Kebijakan Lain

Iklm Investasi
Daya Beli
Ketenagakerjaan
Perdagangan
Industri

**SEKTOR
RIIL**

**FISKAL/
APBN**

APBN yang produktif
Pendapatan Negara
Belanja Negara
Pembiayaan/Utang

**PEMBANGU-
NAN EKONOMI
INKLUSIF**

MONETER

Stabilitas Harga
(Inflasi)
Stabilitas Nilai Tukar
Uang beredar
Suku bunga

TANTANGAN PENGELOLAAN APBN

Menciptakan APBN yang kredibel sebagai alat kebijakan fiskal



Penerimaan **Proyeksi & Estimasi**



Belanja **Komitmen**



Pembiayaan **Sustainability**

Membuat estimasi penerimaan yang **akurat dan kredibel**

Peningkatan kapasitas mengumpulkan penerimaan negara

Rasio penerimaan perpajakan masih **rendah**

Membuat keputusan belanja yang **strategis**

Memprioritaskan **belanja produktif** dan **mendukung pembangunan**

Mengurangi **kemiskinan, kesenjangan, dan pemerataan** kesejahteraan

Memerangi **inefisiensi** dan **korupsi**

Menjaga **disiplin fiskal** (tingkat defisit & utang)

Reformasi sektor keuangan, e.g. Melalui pendalaman pasar keuangan

Mendukung **keuangan inklusif**

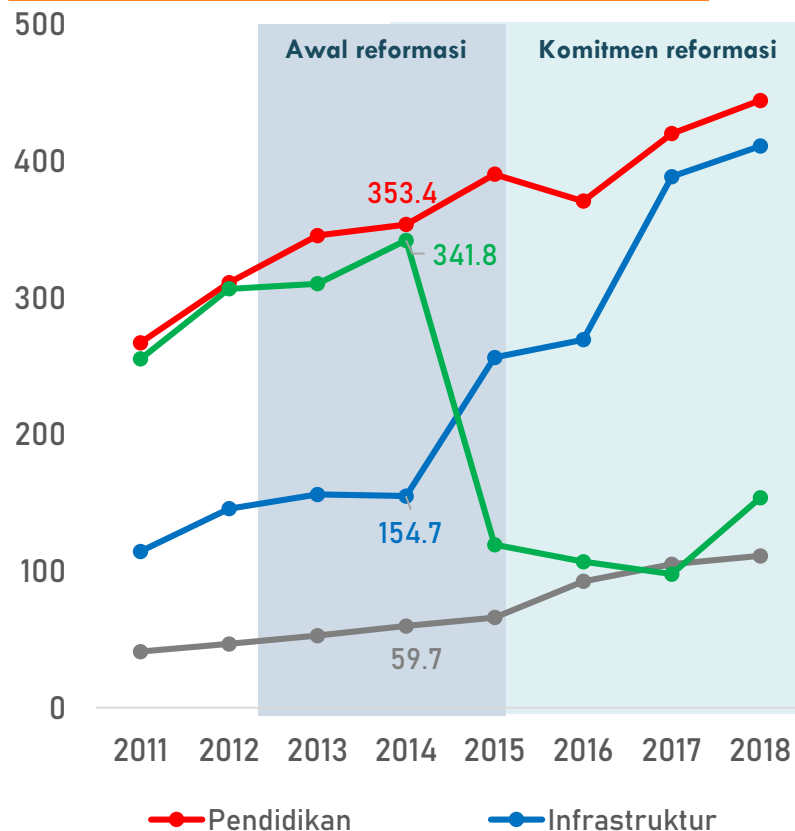
Diimbangi dengan **stabilitas sistem keuangan**

REFORMASI FISKAL YANG KOMPREHENSIF UNTUK OPTIMALISASI PENDAPATAN, BELANJA YANG BERKUALITAS, SERTA PEMBIAYAAN YANG SUSTAINABLE

BELANJA APBN DIDORONG SEMAKIN PRODUKTIF

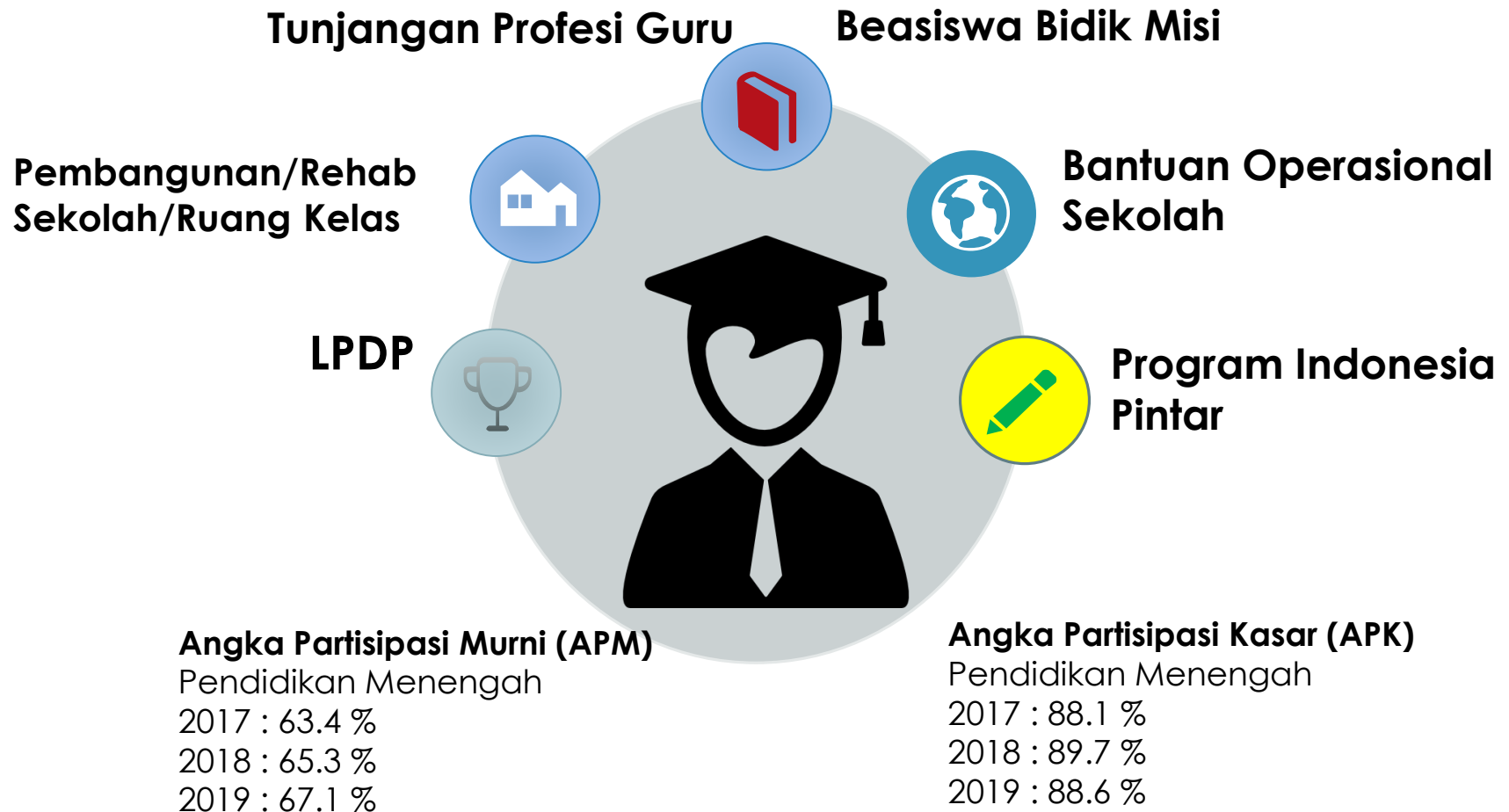
Komitmen pada belanja produktif seperti investasi fisik dan SDM terus ditingkatkan

Belanja Program Prioritas (Rp Tn)



BELANJA PENDIDIKAN

Merupakan salah satu prioritas untuk perbaikan kualitas SDM



BELANJA KESEHATAN

Dalam pembentukan kualitas SDM unggul, peranan belanja kesehatan sangat penting

Program Sasaran

Imunisasi untuk anak
usia 0-11 bulan --
74 Ribu anak



Penyediaan sarana fasilitas
kesehatan yang
berkualitas **49 RS/Balkes**



Program Indonesia Sehat
(Jaminan Kesehatan Nasional
-BPJS Kesehatan) Bantuan
Iuran untuk **92.4 Juta** Jiwa
@23.000/org/bulan



Kesertaan ber-KB melalui
peningkatan akses dan kualitas
pelayanan KBKR **1.8 Juta** Jiwa



Sertifikasi obat
dan makanan
92.5%

Indikator Kesehatan



Stunting

2017 : 29.6
2018 : 28.8



Ketersediaan Obat dan
Vaksin di Puskesmas

2017 : 83%
2018 : 86%

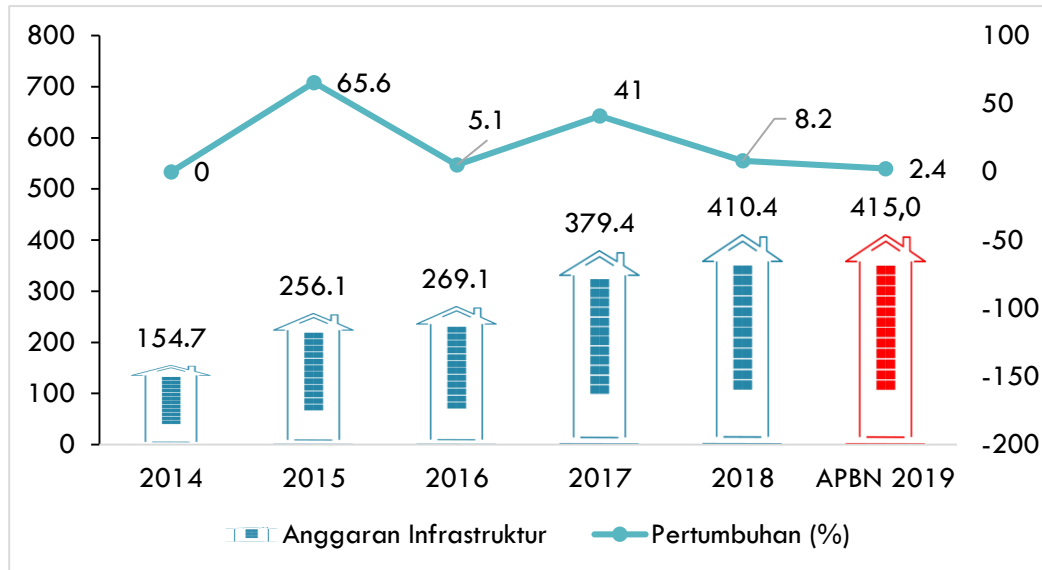


Persalinan di
fasilitas kesehatan

2017: 81%
2018 : 82%

BELANJA INFRASTRUKTUR

Tetap diakselerasi melalui terobosan pembiayaan kreatif



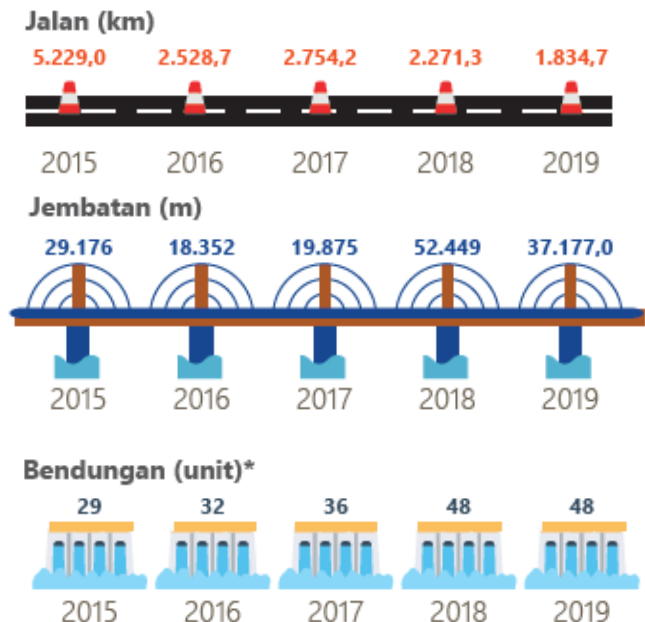
Indikator Pembangunan Infrastruktur
● 2019 ● 2015

Prosentase Kondisi mantap jalan
● 94 ● 93

Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia
● 40 ● 114
menuju menuju

Presentase RT yang menempati hunian layak
● 50,0 ● 47,8
2018

Beberapa Capaian dan Target Pembangunan



* termasuk lanjutan pembangunan

Pembangunan tahap awal dan penyelesaian jalur Kereta Api (km'sp)





MINISTRY OF FINANCE

DIRECTORATE GENERAL OF BUDGET FINANCING AND RISK MANAGEMENT

djppr



PEMBIAYAAN

APBN 2018

DEFISIT → PEMBIAYAAN → UTANG

Filosofi pembiayaan pembangunan melalui utang



Menjaga momentum & menghindari Opportunity Loss

- Belanja prioritas (infrastruktur & SDM) tidak bisa ditunda;
 - ❖ investasi SDM fasilitas kesehatan dan pendidikan
- Penundaan belanja mengakibatkan biaya lebih besar di masa datang



Mengembangkan pasar keuangan

- Menyediakan benchmark bagi industri keuangan
- Menyediakan alternatif investasi bagi masyarakat
- Membantu BI dalam kegiatan operasi moneter



Menjaga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi

- Dalam kondisi perekonomian melamban, stimulus fiskal melalui utang dapat mendorong pertumbuhan.
- Pertumbuhan mendorong peningkatan penerimaan pajak di masa depan untuk membayar kembali utang



Melibatkan peran serta generasi berikutnya dalam berinvestasi yang memberi manfaat jangka panjang (sharing the burden)

- Utang untuk investasi sebagai pemerataan tanggung jawab antar generasi dalam penyediaan aset

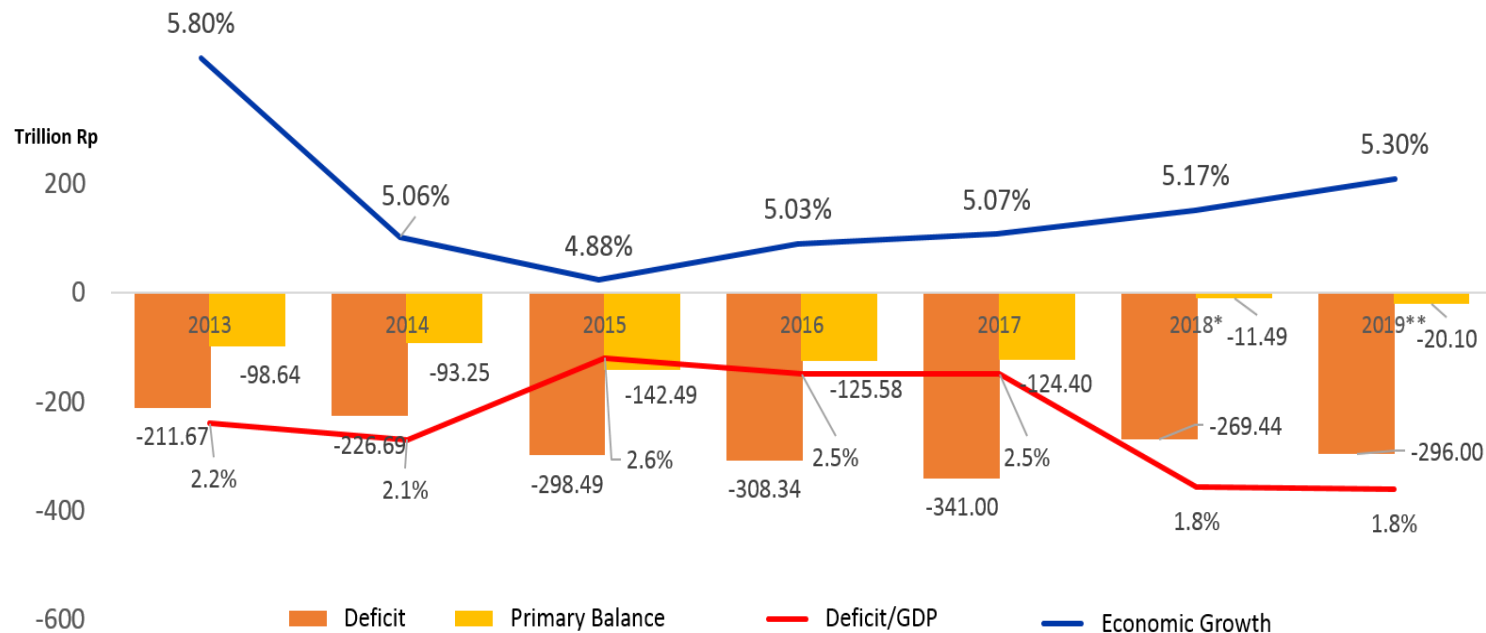
Utang merupakan alat (tools), bukan tujuan yang diperlukan agar pemerintah dapat menjalankan fungsi penting dan mendesak dengan lebih cepat (tanpa penundaan)

KEBIJAKAN DEFISIT APBN

Kebijakan fiskal ekspansif sebagai *countercyclical* terhadap kondisi ekonomi yang melambat

Fungsi APBN : Alokasi, Distribusi, Stabilisasi

Penurunan pertumbuhan ekonomi di *counter* dengan defisit yang lebih tinggi sehingga menaikkan tambahan utang



Note:

- 2019: Budget figures

Dalam hal perkiraan defisit APBN melampaui target, Pemerintah dapat menggunakan dan SAL, melakukan penarikan pinjaman tunai, dan/atau menerbitkan SBN sebagai tambahan pembiayaan (Ketentuan dalam UU APBN 2019)

REGULASI TENTANG DEFISIT APBN DAN RASIO UTANG

Menjaga defisit pada level 1,5-2,5% per PDB dalam jangka menengah

Undang Undang nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara pasal 12 ayat 3 mengatur :

DEFISIT ANGGARAN

Defisit anggaran dibatasi
maksimal 3% dari Produk
Domestik Bruto



1,81%
Realisasi 2018

0,84%
Realisasi s.d. Akhir Juni
2019



29,50%
Akhir Juni 2019

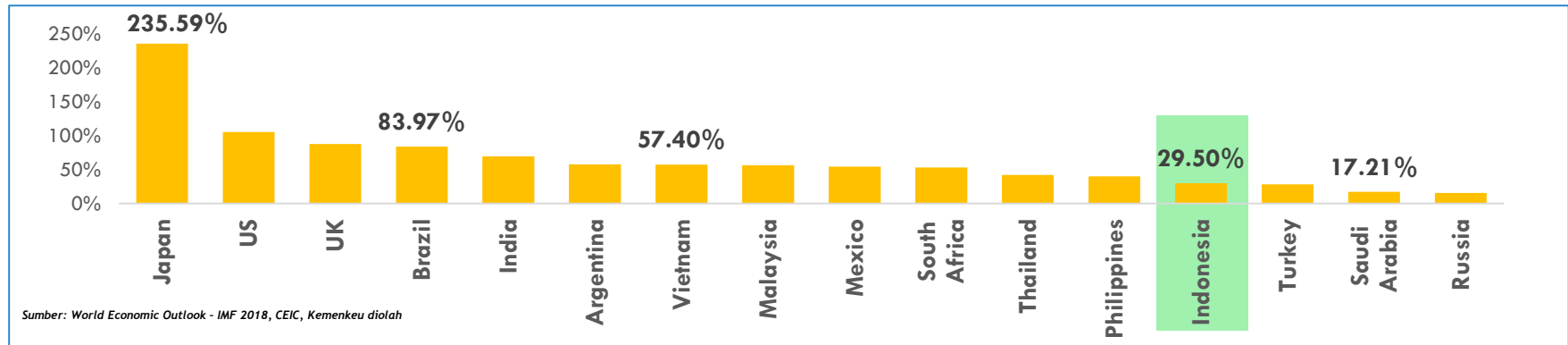
JUMLAH UTANG

Jumlah utang dibatasi
maksimal 60% dari
Produk Domestik Bruto

TREN RASIO UTANG TERHADAP PDB

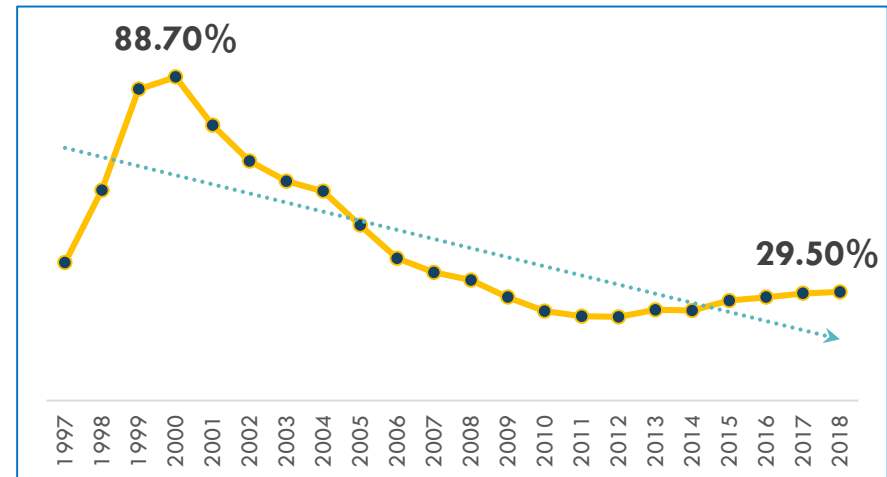
Utang dikelola dengan hati-hati dan berpedoman pada batasan UU

Rasio Utang Indonesia dibandingkan Negara lain



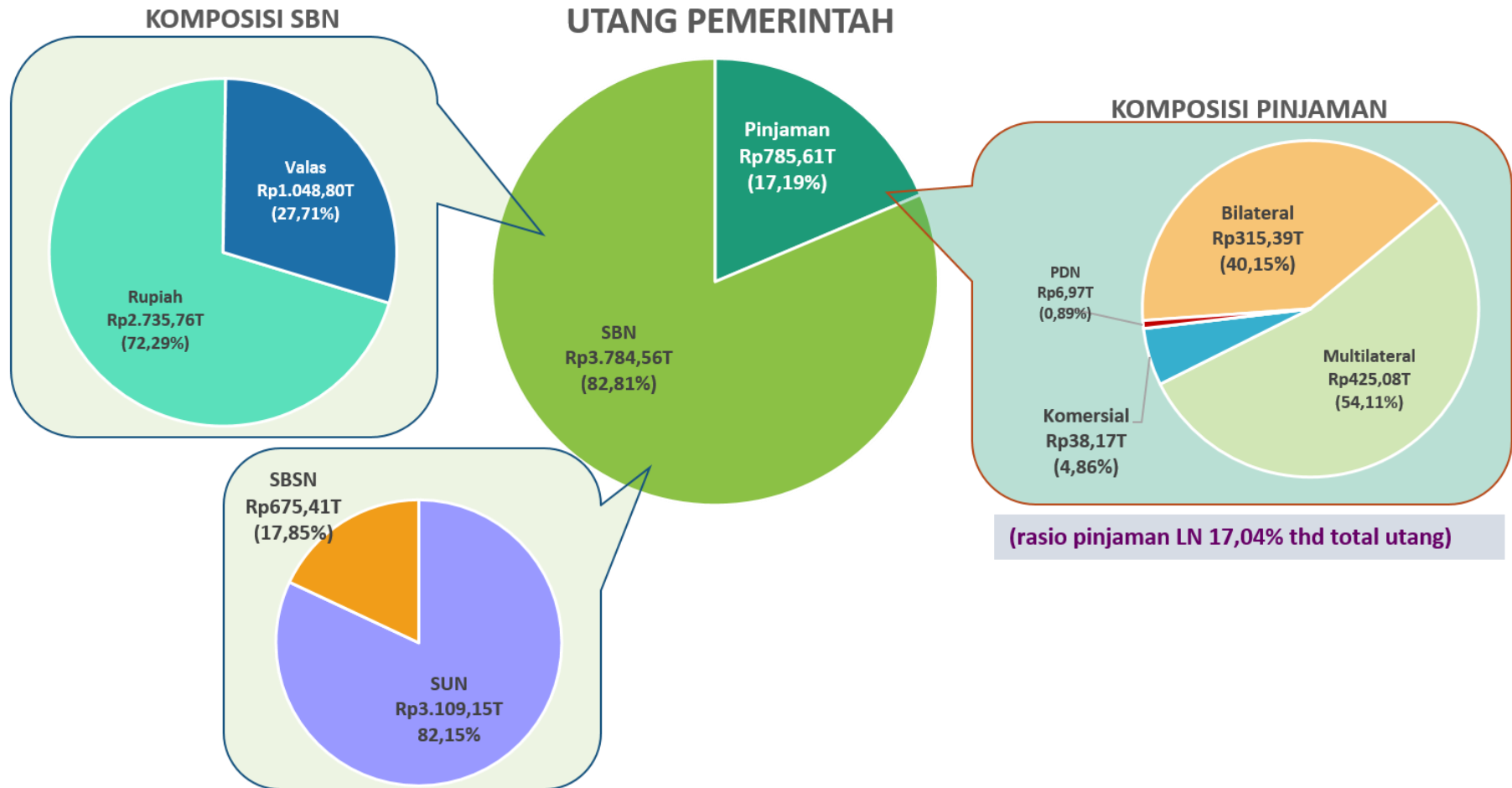
- **Tren rasio utang per PDB menurun (1998-2018).**
 - sedikit meningkat beberapa tahun terakhir karena ekspansi fiskal
 - masih terjaga di kisaran 30% PDB
- Rasio utang per PDB masih di bawah batas ketentuan UU 60%
- **Rasio utang Indonesia relatif rendah dibandingkan negara-negara lain**

Tren Rasio Utang Pemerintah Pusat terhadap PDB



OUTSTANDING UTANG PEMERINTAH JUNI 2019

Outstanding utang Rp 4570,17T dengan rasio utang 29,50% per PDB masih pada level aman





KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO



TERIMA KASIH



DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
KEMENTERIAN KEUANGAN – REPUBLIK INDONESIA

JALAN DR. WAHIDIN RAYA NO. 1, JAKARTA 10710
WEBSITE: WWW.DJPPR.KEMENKEU.GO.ID



@DJPPRkemenkeu



DJPPRKemenkeu



DJPPRKemenkeu



@djpprkemenkeu